

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi ketentuan dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas, khususnya dalam aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi potensi disharmonisasi dalam penerapan peraturan, seperti tumpang tindih kebijakan, ambiguitas norma, serta antinomi terhadap prinsip negara hukum (*rule of law*) yang dapat menyebabkan diskriminasi, eksploitasi, bahkan pengurangan atau penghapusan hak-hak penyandang disabilitas. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelayanan terhadap penyandang disabilitas, khususnya dalam aspek aksesibilitas, masih menghadapi berbagai kendala dan kekurangan. Oleh karena itu, diperlukan analisis situasi yang komprehensif terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, guna memberikan pemahaman bahwa isu disabilitas bersifat lintas sektor dan tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu instansi atau lembaga saja.

Kata kunci: penyandang disabilitas, aksesibilitas, implementasi kebijakan.

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of the provisions stipulated in Regional Regulation No. 2 of 2019 concerning the Protection and Empowerment of the Elderly and Persons with Disabilities, with particular emphasis on accessibility for persons with disabilities. The primary objective is to identify potential legal disharmony resulting from overlapping regulations, normative ambiguities, and antinomies within the rule of law that may lead to discrimination, exploitation, or even the reduction and elimination of the rights of persons with disabilities. Such legal inconsistencies often stem from a lack of synchronization between the normative legal framework and its practical application. Although the right to accessibility is a constitutional entitlement of every Indonesian citizen, including persons with disabilities, the reality demonstrates significant deficiencies in the provision of accessible services. Accordingly, this study undertakes a situational analysis of the fulfillment of disability rights in the context of accessibility, aiming to promote a broader understanding that disability-related issues are inherently cross-sectoral and cannot be addressed solely by a single governmental or institutional entity.

Keywords: persons with disabilities, accessibility, policy implementation.